

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata "Tinjauan" berasal dari kata "Tinjau", yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti "melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian membuat kesimpulan." Tinjauan, kemudian, adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, dan pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) adalah berbagai macam karya ilmiah. Meninjau ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui, memantau, dan mengamati fenomena yang ingin di ketahui melalui beberapa metode yang digunakan peneliti. Dalam peninjauan, peneliti akan mendeskripsikan secara rinci apa yang ingin ditinjau dan bagaimana fenomena tersebut akan ditinjau. Sedangkan Menurut (Putranto 2020:5), tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

Persyaratan administrasi secara luas merujuk pada semua dokumen, prosedur, dan persyaratan lain yang diperlukan untuk menjalankan suatu aktivitas atau proses secara efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini biasanya mencakup dokumen seperti kontrak, surat izin, formulir aplikasi, atau bahkan kebijakan internal, baik itu perusahaan hingga instansi pemerintahan. Persyaratan administrasi disusun sedemikian rupa untuk memudahkan dalam pengoprasian suatu kegiatan agar tersusun, memudahkan dalam pencatatan, kesesuaian kriteria. Kegiatan administratif ialah merupakan syarat melakukan proses kerjasama antara sekelompok orang secara tertentu, guna mencapai suatu tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya. Pentingnya melakukan kegiatan administrasi diantara lain sebagai alat pendataan, bukti kesepakatan, dan sebagai acuan berjalannya kegiatan yang ada.

Proyek konstruksi pemerintah ialah suatu jenis pengadaan yang diadakan pihak pengadaan tidak ada lain kegunaannya untuk mensejahterakan

masyarakat, adanya pembangunan dari desa hingga ke tingkat kabupaten kota dapat menunjang kegiatan sarana mobilitas hingga sarana fasilitas masyarakat umum lainnya. Hampir setiap masyarakat memerlukan prasarana yang dapat berguna bagi penunjang kegiatan sehari-hari. Dalam perkembangannya pembangunan akan terus bergerak dari masa ke masa terus bergerak perlahan, bahkan berevolusi dikit demi sedikit. Mekanisme proyek konstruksi pada pemerintahan memiliki dua metode yakni mekanisme tender/seleksi dan penunjukan langsung, mekanisme tender/seleksi merupakan metode yang digunakan untuk penunjukan suatu pemenang kontraktor dan badan usaha yang terpilih, sebaliknya mekanisme penunjukan langsung ialah metode yang digunakan pihak pengadaan untuk mengadakan proyek dengan cara menunjuk langsung pihak penyedia, dikarenakan pada saat penulisan Laporan Akhir ini penulis bertepatan pada pengerjaan proyek penunjukan langsung yang diemban CV. Putri Karya yakni proyek pembangunan Gapura di Simpang Pisang di Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir).

Sebagai Badan usaha penyedia jasa konstruksi bangunan CV Putri Karya didirikan oleh Ibu Adelia Marbela, S.H. yang memulai perjalanan usaha jasanya pada tahun 2019. Dalam hal ini CV Putri Karya Kayuagung sebagai mitra yang menjalankan proyek pemerintah berperan sebagai promotor, bertanggung jawab, dan pengawasan serta pelaksana proyek konstruksi yang mereka emban. Sebagai pihak ke tiga dari berjalannya suatu proyek konstruksi yang diadakan, Sebagai badan usaha yang bergerak di pelayanan jasa CV. Putri Karya ikut serta dalam mentaati dan mengimplementasikan suatu aturan baik itu aturan tertulis dan tidak tertulis, hal tersebut dibuktikan pada kesuksesan dalam melaksanakan proyek-proyek konstruksi yang mereka jalanni hingga saat ini

Menurut Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses pengadaan atau belanja oleh kementrian atau lembaga atau perangkat daerah, baik berupa

barang/jasa oleh penyedia yang dibiayai oleh APBN/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) melalui mekanisme Tender/seleksi atau Penunjukan Langsung yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pekerjaan atau pengadaan yang dibutuhkan oleh pemerintah yakni dalam bentuk barang: alat kantor, benih, pupuk, obat, hewan, tanaman, elektronik, kendaraan, makanan, alat tulis kantor, seragam, alat kesehatan, alat pertanian, alat olahraga, buku, alat musik, dan lain sebagainya dalam segi pengadaan dalam bentuk jasa yakni: jasa konstruksi, jasa service, jasa keahlian profesi, jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa catering, jasa travel dan lain-lain. Dari banyaknya pengadaan barang/jasa penulis tertarik pada penunjukan langsung pada jasa proyek konstruksi.

Dalam era pembangunan infrastruktur yang semakin pesat, proyek konstruksi pemerintah menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan proyek konstruksi pemerintah tidaklah mudah. Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam syarat administrasi yang diperlukan dalam melaksanakan proyek tersebut. Ada banyak kasus, kegagalan proyek konstruksi pemerintah disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap syarat administrasi yang berlaku. Ada beberapa kasus kegagalan kontraktor dalam melaksanakan proyek pemerintah, yakni kasus kurang kelengkapan pada saat awal mula pemberian data legalitas badan usaha kepada pihak pertama yakni kepada pejabat pengadaan, kasus tersebut ialah suatu kesalahan awal seorang kontraktor pada saat awal ingin mengerjakan suatu proyek konstruksi pemerintah, yang kedua yakni ketentuan kontrak pada pelaksanaan konstruksi, hal tersebut yang mana terjadi apabila terjadi keterlambatan pada penyelesaian pengerjaan konstruksi, keluar dari kalender pengerjaan maka pihak Dinas Pekerjaan Umum akan memberikan surat layangan atau surat teguran pada kontraktor untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan apabila tidak juga di laksanakan maka pihak Dinas Pekerjaan Umum akan memberikan denda pada kontraktor, dan juga seperti kasus pada saat

pencairan dana, pada saat pencairan dana, maka pihak Dinas Pekerjaan Umum akan memeriksa kelengkapan syarat ketentuan syarat administrasi yang disiapkan oleh kontraktor dan apabila syarat tersebut telah lengkap maka pihak Dinas Pekerjaan Umum akan mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar), dan sebaliknya apabila terjadi ketidaklengkapan pada syarat administrasi untuk pencairan tersebut maka pihak PU akan memberi tahu kepada pihak kontraktor untuk melengkapi syarat tersebut. Ketentuan SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut memiliki tenggat dan apabila terjadi keteledoran kontraktor dalam melengkapi dan memberikan syarat tersebut kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) maka akan terjadi penundaan dalam pencairan. Syarat administrasi yang tidak dipenuhi dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, peningkatan biaya, bahkan perselisihan hukum antara pihak-pihak terlibat.

Sebagai Badan usaha penyedia jasa konstruksi bangunan CV Putri Karya Kayuagung didirikan oleh Ibu Adelia Marbela, S.H. yang memulai perjalanan usaha jasanya pada tahun 2019. Dalam hal ini CV Putri Karya Kayuagung sebagai mitra yang menjalankan proyek pemerintah berperan sebagai promotor, bertanggung jawab, dan pengawasan serta pelaksana proyek konstruksi yang mereka emban.

Dengan berkaitannya judul serta jurusan yang saat ini penulis jalankan dan ingin membuka wawasan untuk diri sendiri serta untuk masyarakat luas yang ingin mengetahui apa saja syarat administrasi proyek pemerintah melalui CV Putri Karya Kayuagung, maka dari itu penulis memiliki ketertarikan membahas syarat administrasi apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat memulai dan menjalankan proyek konstruksi pemerintah, dengan itu maka penulis ingin mengangkat judul mengenai **“Tinjauan terhadap syarat administrasi proyek konstruksi pemerintah melalui CV Putri Karya Kayuagung.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Penulis merumuskan yakni
 “Bagaimana kelengkapan administrasi proyek untuk memperlancar kegiatan perusahaan”

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar laporan ini lebih terarah serta tidak terjadi penyimpangan dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup hanya pada syarat administrasi proyek konstruksi pemerintah melalui CV Putri Karya Kayuagung.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian ini bertujuan:
 “Mengetahui syarat administrasi apa sajakah yang harus di siapkan ketika ingin memulai menjalankan suatu proyek dari pemerintah”

1.4.1 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Sebagai informasi dan pengetahuan dan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai syarat administrasi proyek pemerintah dengan perusahaan yang menjalankan proyek

b. Bagi Perusahaan

Sebagai media branding badan usaha jasa konstruksi

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan bahan bacaan untuk mengetahui syarat administrasi pada proyek pemerintah

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Untuk mendeskriptifkan syarat administrasi konstruksi proyek pemerintah melalui CV Putri Karya Kayuagung. Rancangan penelitian

yang akan digunakan penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian kualitatif berupa menunjuk pada prosedur penelitian menghasilkan data kualitatif berupa ungkapan, pandangan, pemikiran dan tindakan obyek penelitian.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di Jalan Sekolah, Nomor 40, Lingkungan 02, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir lokasi penelitian ini dilakukan atas pertimbangan agar penulis lebih mudah Mendapatkan informasi langsung dari informan.

1.5.2 Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Data primer yang diperoleh penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak internal (Pimpinan CV Putri Karya Kayuagung.)

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah kumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk memproses lebih lanjut, misalnya sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan dan data-data pendukung lainnya yang sesuai dengan masalah yang diangkat dalam laporan ini.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung yakni mendatangi pemilik CV Putri Karya Kayuagung. Dengan memberikan pertanyaan yang dibutuhkan oleh penulis dan juga meminta data-data yang penulis perlukan.

1.6.1 Wawancara

Menurut (Yusi 2016:114), dalam (Marisa 2022:8), wawancara adalah dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dan responden. Wawancara yang digunakan penulis lakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, jenis wawancara yang penulis gunakan dalam pelaksanaan wawancara yakni wawancara terstruktur dan pertanyaan yang diajukan bersifat bebas dan terbuka.

Dalam penelitian ini peneliti memilih partisipan dari dua bentuk informan yaitu informan kunci dan informan pendukung untuk memperoleh informasi yakni:

- a. Informan kunci terdiri dari dan Informan kunci terdiri dari Pimpinan CV Putri Karya Kayuagung. Peneliti memperoleh informasi yang paling penting dari informan kunci.
- b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat dalam fenomena yang terjadi yakni kontraktor aktif dari CV Putri Karya Kayuagung
- c. Informan tambahan untuk mengkonfirmasi informasi yang ada, peneliti mewawancarai informan pendukung (PNS) Pegawai Negeri Sipil Bagian keadministrasian di Dinas Pekerjaan Umum untuk mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari informan kunci.

Tabel 1.1
Jumlah Responden Informan Kunci dan Informan Tambahan

No	Nama	sebagai	Status
1.	Adelia Marbela S.H.	Informan Kunci	Direktur CV Putri Karya
2.	Yulia Ambarwati	Informan Kunci	Pegawai Negri Sipil, Bagian Administrasi Pada Dinas PUPR
3.	Joe Rangga Ismail	Informan Tambahan	Kontraktor aktif

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

1.6.1.1 Indikator Wawancara

Teori Paton dalam buku Daymon.,C. & Haloway menyatakan bahwa apa saja pertanyaan yang bisa ditanyakan pada informan dalam penelitian kualitatif jenis pertanyaan yang ditanyakan yakni :

- a. Pengetahuan, penanya dapat menanyakan terkait pengetahuan kepada informan terkait data yang ingin digali pada bidangnya.
- b. Pengalaman, penulis dapat juga menanyakan terkait pengalaman yang dialami oleh narasumber terkait fenomena yang terjadi.
- c. Perasaan, serta peneliti juga dapat menanyakan terkait perasaan yang dialami oleh narasumber terkait data yang ingin didapatkan dalam penelitian ini.

Pada penulisan Laporan Akhir ini penulis menggunakan teori Paton yang diungkapkan dalam buku Daymand, & Halloway, untuk menanyakan terkait prosesi wawancara yang akan dilakukan pada narasumber yang akan dipilih.

1.6.2 Studi Pustaka

Menurut (Kurniawati 2024:22), studi pustaka adalah desain penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan suatu topik yang ditemukan di lapangan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dengan demikian maka peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai perbandingan antara teori dengan praktaknya di lapangan. Data sekunder diperoleh dengan pencarian

melalui internet. Membaca literatur, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang relevan.

1.7 Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan wawancara dan pengujian terhadap data primer dan sekunder, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa dan pembahasan dari hasil uji dan wawancara yang telah dilakukan. Hal tersebut dikemukakan oleh Sugiyono sebagai berikut Menurut (Sugiyono 2010:335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah “proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesis, menyusun pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.